

## 1.015 Bencana Dilaporkan di Yogyakarta Sepanjang 2021



**Sumber gambar:**

<https://tekno.tempo.co/read/1544849/1-015-bencana-dilaporkan-di-yogyakarta-sepanjang-2021/full&view=ok>

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Biwara Yuswantana menuturkan selama tahun 2021 tercatat sebanyak 1.015 laporan bencana yang dilaporkan terjadi di wilayahnya. Laporan itu terbagi dengan kategori 824 kejadian, 69 bencana dan 122 kejadian lain-lain sehingga akumulasi kejadian dan kebencanaan sebanyak 893. “Pengkategorian tersebut telah dilakukan verifikasi hingga 21 Desember 2021 dengan penggabungan kejadian lintas wilayah,” kata Biwara. Biwara mengatakan kejadian kebencanaan di wilayah Yogyakarta didominasi oleh kejadian tanah longsor sebanyak 338 titik, gempa bumi sebanyak 217 kali (203 tidak terasa dan 14 terasa), angin kencang 148 kali, 155 kebakaran permukiman dan bangunan, 18 kali kebakaran lahan.

Selain itu ada juga 11 kali banjir, 3 kali banjir lahar hujan, 2 kali letusan gunung api dan 1 kejadian pandemi yang telah berlangsung sejak 2020. “Dari seluruh kejadian kebencanaan tersebut, sebanyak 69 dikategorikan sebagai bencana meliputi 18 kali angin kencang, 2 kali letusan gunung api, 2 kali kebakaran, 46 titik tanah longsor, dan 1 kali pandemi,” kata dia.

Sebaran kejadian kebencanaan berdasarkan wilayah kejadian atau wilayah terdampak adalah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 452 kali kejadian atau sebesar 25 persen. “Sehingga Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah paling terdampak selama 2021,” kata dia. Selanjutnya Kabupaten Bantul sebanyak 438 kali kejadian atau 24 persen dari seluruh wilayah terdampak kejadian di DIY. Kabupaten Gunungkidul sebanyak 325 kejadian atau 18 persen. Kabupaten Sleman sebanyak 299 kali kejadian atau 17 persen dan wilayah Kota Yogyakarta terdampak 283 kali kejadian atau 16 persen.

Jika dilihat data per wilayah, angka menjadi lebih tinggi dikarenakan banyaknya kejadian lintas wilayah seperti gempa bumi, angin kencang dan banjir. Dari seluruh kejadian kebencanaan yang terjadi kecuali pandemi Covid-19 di DIY sedikitnya ada 1.950 jiwa terdampak serta korban jiwa. Lalu jumlah meninggal dunia sebanyak 9 jiwa, 33 jiwa luka dan 118 harus mengungsi. “Yang terdampak untuk pandemi belum dapat disimpulkan mengingat hampir seluruh jiwa di DIY terdampak serta kondisi masih berlangsung hingga saat ini,” kata dia. Sedangkan untuk kondisi fisik sedikitnya 688 rumah rusak, 187 bangunan tergenang, 995 pohon tumbang, 113 tempat usaha rusak, 22 fasilitas pendidikan rusak, 16 rumah ibadah rusak, 111 titik talud rusak, 52 kendaraan rusak, 6 hektare lahan tergenang dan 8 hektare lahan rusak terbakar.

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan jembatan lengkung Sungai Alalak, Kamis, 21 Oktober 2021. Jembatan ini menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel). Jokowi juga dijadwalkan meresmikan Pabrik Bio Diesel PT Jhonlin Agro Raya di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelahnya, Kepala Negara akan meninjau kegiatan vaksinasi di halaman Rumah Sakit Anshari Shaleh, Banjarmasin.

"Ada sejumlah agenda kerja Presiden dalam kunjungan ke Kalsel di antaranya peresmian jembatan Sei Alalak dan peninjauan vaksinasi covid 19," kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dilansir dari Media Indonesia, Kamis, 21 Oktober 2021. Jembatan Sungai Alalak dibangun dengan biaya Rp278 miliar oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Pandji. Jembatan yang dibangun sejak 2019 tercatat sebagai jembatan pertama di Indonesia menggunakan rancangan cable-stayed dan struktur jembatan lengkung.

#### **Sumber berita:**

1. <https://tekno.tempo.co/read/1544875/bpptkg-yogya-jawab-soal-rumor-keruntuhan-mendadak-kubah-lava-merapi>, BPPTKG Yogya Jawab Soal Rumor Keruntuhan Mendadak Kubah Lava Merapi, Kamis, 30 Desember 2021.
2. <https://m.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxgRZgK-jokowi-dijadwalkan-resmikan-jembatan-sungai-alalak-hari-ini>, Jokowi Dijadwalkan Resmikan Jembatan Sungai Alalak Hari Ini, 21 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

**Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>2</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.<sup>3</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.<sup>4</sup>

**Program Pembangunan Nasional**

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka (3)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka (4)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.<sup>6</sup>
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>7</sup>
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.<sup>8</sup>
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.<sup>9</sup>
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.<sup>10</sup>
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.<sup>11</sup>
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

## **Rincian Program Pembangunan**

### **Kondisi Umum**

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga

---

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)

<sup>7</sup> ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>9</sup> ibid, Pasal 6 ayat (3)

<sup>10</sup> ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> ibid, Pasal 7 ayat (3)

terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.<sup>13</sup>

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.<sup>14</sup>

### **Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025**

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.<sup>15</sup>
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.<sup>16</sup>
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global,

---

<sup>13</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

<sup>14</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.<sup>17</sup>

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.<sup>18</sup>
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.<sup>19</sup>
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.<sup>20</sup>
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.<sup>21</sup>
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.<sup>22</sup>
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri

---

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

<sup>20</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

<sup>21</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

<sup>22</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.<sup>23</sup>

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

<sup>24</sup> Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22